

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan masalah lingkungan yang dialami hampir semua negara di dunia. Menurut *World Health Organization* (dalam Hardiyanti dkk, 2020: 113-114) bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, sesuatu yang dibuang, atau tidak disukai yang tidak terjadi dengan sendirinya akibat aktivitas manusia. Kaza dkk (2018: 3) mengatakan bahwa Bank Dunia memperkirakan bahwa produksi sampah global akan meningkat dari 2,01 miliar ton pada tahun 2016 menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050.

Mengutip pendapat Purnaweni (2020: 149) bahwa timbunan sampah terus bertambah karena beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk, tidak memadainya tempat pembuangan sampah, kurangnya kapasitas dalam pengelolaan sampah, rendahnya pengetahuan mengenai pemanfaatan sampah, dan keengganan untuk memanfaatkan sampah sebagai hasil sampingan yang bermanfaat. Pengelolaan sampah yang tidak efektif akan mencemari lingkungan dan menurunkan taraf hidup manusia maupun ekosistem.

Pengelolaan sampah menjadi permasalahan global sejak abad 21 karena makin sering munculnya masalah terkait pengelolaan sampah sehingga semua negara menunjukkan komitmen untuk mengatasinya. Salah satu contoh adalah pengelolaan sampah di Korea Selatan yang menurun sejak pandemi covid-19 karena terjadi pergeseran dalam kehidupan sehari-hari dan pola konsumsi masyarakat yang telah menyebabkan lonjakan jumlah sampah plastik yang

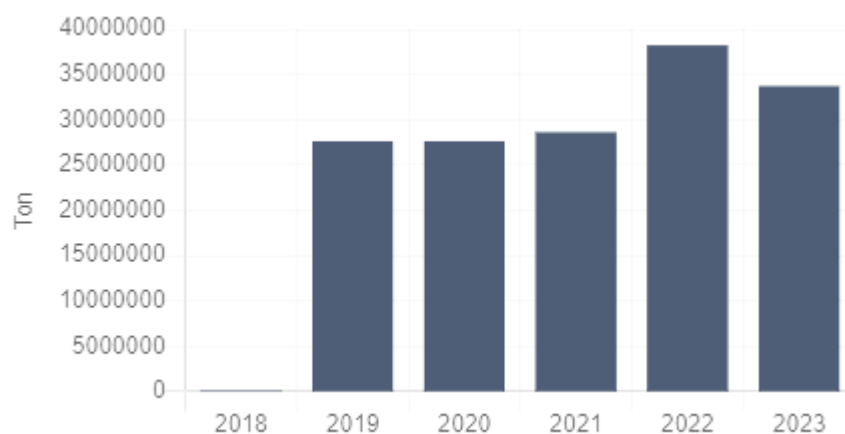
seringkali dalam bentuk wadah kemasan (Song & Park, 2024: 7-8). Negara Filipina juga mengalami permasalahan dalam pengelolaan sampah, yaitu kebiasaan masyarakat yang masih mengumpulkan dan mengangkut sampah. Permasalahan ini disebabkan oleh pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan pengelolaan sampah 3R, alokasi dana yang tidak memadai, dan tempat pembuangan akhir sampah yang tidak mencukupi (Camarillo & Bellotindos, 2021: 30-42). Masalah yang sama juga dihadapi kota Ludhiana, India dalam mengelola sampah, yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai, lahan yang tidak memadai untuk pembuangan sampah akhir, kurangnya rencana pengelolaan sampah, kesadaran masyarakat, tidak terintegrasinya teknologi modern, dan kurangnya penegakan hukum dan peraturan (Mir dkk, 2021: 9-10).

Upaya nyata untuk menyikapi tantangan global terkait permasalahan sampah dapat dilakukan melalui penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Menurut Anas dkk (2023: 8) *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan konsep pembangunan yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan, menjamin keadilan, dan menerapkan tata kelola yang mampu mempertahankan peningkatan standar hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 target yang saling terkait dan mendukung dalam mengatasi berbagai tantangan global untuk mensejahterakan masyarakat.

Masalah sampah termasuk dalam SDGs 12, yang menekankan efisiensi sumber daya, minimalisasi sampah, dan metode produksi yang ramah lingkungan untuk menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan di seluruh dunia

(Muslimah, 2024). Saputra (2021: 57) mengatakan bahwa penanganan sampah harus dikembangkan dan ditingkatkan dengan harapan pada tahun 2030 dampak lingkungan akibat limbah dapat dikurangi.

Salah satu negara yang tiap tahunnya berhadapan dengan masalah sampah adalah Indonesia. Berdasar data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama lima tahun terakhir, timbulan sampah di Indonesia tahun 2019-2022 meningkat pesat akibat perubahan perilaku masyarakat sejak pandemi covid-19, seperti kebiasaan berbelanja barang dan makanan secara daring serta meningkatnya penggunaan alat pelindung diri (APD), seperti masker dan sarung tangan. Kemudian, tahun 2023 timbulan sampah Indonesia telah mengalami penurunan, sebagaimana tampak pada Gambar 1.1 tentang timbulan sampah di Indonesia tahun 2019-2023 berikut ini:



Gambar 1.1 Produksi Sampah Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: SIPSN, 2023

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Indonesia dihadapkan pada permasalahan tingginya angka produksi sampah. Meskipun pada tahun 2023 jumlah sampah yang dihasilkan menurun dibandingkan tahun 2022, yakni sebesar

33.672.546,55 ton atau turun sebesar 4.499.727,22 ton dari tahun 2022 sebesar 38.172.273,77 ton. Mayoritas sampah yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2023 menurut data SIPSN adalah sampah makanan (40,76%), sampah plastik (19,29%), sampah kayu/ranting (11,2%), sampah kertas/kardus (10,93%), sampah logam (3,32%), sampah kain (2,81%), sampah kaca (2,48%), sampah karet/kulit (2,31%), dan sampah lainnya (6,9%).

Salah satu sebab peningkatan timbunan sampah di Indonesia adalah akibat dari pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara terpadat penduduknya, menduduki peringkat keempat dunia dengan jumlah penduduk sebesar 279 juta jiwa, yang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan (BPS, 2023). Selain itu, perkembangan industri di Indonesia memberikan perubahan positif bagi kehidupan ekonomi, namun perkembangan industri juga memberi perubahan yang negatif bagi lingkungan sebab menghasilkan limbah padat dan cair dengan jumlah yang besar. Wardani (2023: 4-5) dalam penelitiannya mendukung hal tersebut dengan mengatakan bahwa aktivitas industri dapat menghasilkan sampah pabrik yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Permasalahan sampah menjadi isu penting, terutama di wilayah Indonesia seperti Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah menduduki peringkat kedua provinsi yang memproduksi sampah paling tinggi di Indonesia tahun 2023, yaitu mencapai 4,63 juta ton. Hal tersebut melebihi DKI Jakarta selaku Ibukota negara Indonesia yang berada di posisi keempat dengan timbunan sampah sebesar 3,14 juta ton (SIPSN, 2023). Tingginya timbunan sampah di Jawa Tengah mengingat bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi pusat pembangunan

ekonomi Indonesia. Berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan mulai dari industri, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan hingga perdagangan. Syafruddin Pakar Lingkungan Universitas Diponegoro mengatakan Jawa Tengah masuk dalam daerah darurat sampah sehingga permasalahan ini memerlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai budaya dan ilmu pengetahuan guna meningkatkan kepedulian mengelola sampah (Jatengprov, 2019).

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah perlu melakukan pengelolaan sampah secara tepat mengingat bahwa Kota Semarang berperan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan, dan kegiatan pelayanan. Oleh karena itu, banyak masyarakat dari luar Kota Semarang yang pindah ke Kota Semarang. Berdasarkan data BPS Kota Semarang selama lima tahun sebelumnya jumlah penduduk kota ini sempat menurun di tahun 2020 namun dengan tren yang meningkat hingga tahun 2023, sebagaimana tampak pada Tabel 1.1 tentang jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2019-2023 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk
2019	1.814.110
2020	1.653.524
2021	1.656.564
2022	1.659.975
2023	1.694.743

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 Kota Semarang memiliki jumlah penduduk relatif tinggi setiap tahunnya. Setyono dkk (2018: 120) mengatakan bahwa produksi sampah

rumah tangga meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kota Semarang sebagai akibat tingginya tingkat urbanisasi. Hal ini didukung oleh Yulistia dkk (2015: 1) dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk Kota Semarang dan fakta bahwa Semarang menjadi salah satu tujuan dari urbanisasi, mengakibatkan meningkatnya produksi sampah dari aktivitas masyarakatnya.

Kota Semarang menduduki peringkat pertama sebagai daerah penghasil sampah terbesar di Jawa Tengah dengan produksi sampah sebesar 431.534,65 ton pada tahun 2023. Dinas Lingkungan Hidup mencatat bahwa produksi sampah di Kota Semarang kembali meningkat.

Tabel 1.2 Timbulan Sampah Kota Semarang Tahun 2019-2023

Tahun	Timbulan Sampah Harian (ton)	Timbulan Sampah Tahunan (ton)
2019	1.251,71	456.873,35
2020	1.276,74	466.010,79
2021	1.180,14	430.749,75
2022	1.181,06	431.085,22
2023	1.182,29	431.534,65

Sumber: SIPSN, 2023

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa pada saat pandemi covid-19 tahun 2020 timbulan sampah Kota Semarang sangat tinggi mencapai 466.010,79 ton atau meningkat sebesar 9.137,44 ton, dari tahun 2019 sebesar 456.873,35 ton. Hal ini akibat dari pola konsumsi masyarakat berubah sejak pandemi yang lebih menyukai hal-hal yang serba instan sehingga menyebabkan lonjakan sampah di Kota Semarang dan paling banyak berupa sampah plastik dalam bentuk wadah kemasan. Kegiatan pengelolaan sampah juga tidak dapat berjalan secara maksimal saat pandemi

sehingga terjadi penumpukan sampah di TPA Jatibarang. Produksi limbah di Kota Semarang kembali meningkat pasca pandemi akibat kembalinya aktivitas masyarakat, menurunnya kasus Covid-19, serta dilonggarkannya sejumlah aktivitas masyarakat di luar rumah. Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat terjadi peningkatan timbunan sampah pada tahun 2023 sebesar 449,43 ton dari tahun 2022 dengan produksi sampah mencapai 1.182,29 ton per hari (SIPSN, 2023).

Pengelolaan sampah yang tepat di Kota Semarang sangat penting dan perlu dilakukan sebab TPA Jatibarang telah mengalami kelebihan kapasitas dan melampaui batas usia operasionalnya. Purnaweni (2017: 4) mengatakan bahwa kapasitas TPA Jatibarang sekitar 850 ton per hari, hanya sekitar 150 ton sampah yang dapat diolah menjadi kompos dan sisanya hanya ditimbun. Sementara itu, rata-rata 1.110–1.150 ton sampah dibuang setiap hari di TPA Jatibarang (DLH, 2022). Kemudian, batasan usia operasi TPA umumnya adalah 30 tahun, padahal usia TPA Jatibarang yang telah mencapai 31 tahun (Khumairoh, 2024: 10). TPA Jatibarang juga sempat mengalami kebakaran pada 18 September 2023 akibat masih adanya bara api di tumpukan sampah (DLH, 2024). Gas metana dari sampah organik dan sampah anorganik yang terbakar karena sinar matahari menyebabkan bara api tersebut muncul. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang sedang mengalami darurat sampah.

Pengelolaan sampah selalu menjadi permasalahan penting dalam administrasi publik karena berkaitan dengan pelayanan publik. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kemudian masyarakat dan pihak lain dilibatkan dalam pelaksanaannya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan

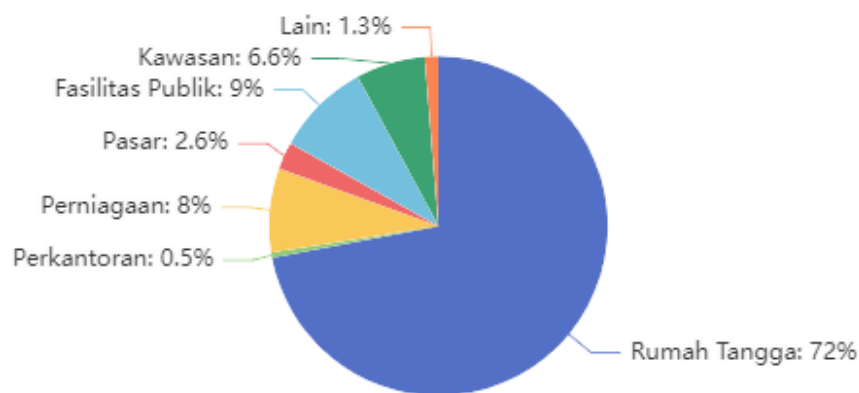
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam upaya mengatasi masalah sampah negara ini. Selanjutnya sebagai peraturan turunan penyelenggaraan pengelolaan sampah juga telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 adalah kegiatan yang dilakukan secara metodis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Adanya pengelolaan sampah diharapkan dapat mengurangi masalah peningkatan timbulan sampah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Paradigma lama pengelolaan sampah dengan konsep kumpul-angkut-buang sampah sudah tidak dapat diandalkan lagi karena dapat meningkatkan beban sampah di TPA. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Salah satunya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan menggunakan konsep 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang perlu dikembangkan karena pengelolaan ini mampu meminimalkan timbulan sampah langsung dari sumbernya dan meminimalkan dampak sampah bagi lingkungan. Purnaweni (2020: 6) mendukung hal tersebut melalui penelitiannya yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tergantung pada kesadaran yang baik dari masyarakat karena perilaku mereka merupakan variabel yang penting. Fatmawaty dkk (2020: 221) juga mendukung melalui penelitiannya yang menunjukkan bahwa peran serta

masyarakat sangat penting untuk keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Permasalahan sampah di Kota Semarang terus menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup terkait urgensi pengelolaan sampah yang baik guna mencapai target penurunan sampah sebesar 30% dan pengelolaan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 (DLH Kota Semarang, 2024). Menggencarkan pendirian bank sampah merupakan salah satu langkah Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menanggulangi timbulan sampah di Kota Semarang. Bank sampah menerapkan sistem *reduce*, *reuse*, dan *recycle* yang dimulai dari lingkup terkecil, yaitu rumah tangga. Berdasar data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mayoritas sampah yang dihasilkan di Kota Semarang berasal dari rumah tangga.



Gambar 1.2 Komposisi Sampah Kota Semarang Berdasarkan Sumber Sampah Tahun 2023
Sumber: SIPSN, 2023

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kota Semarang didominasi oleh sampah rumah tangga sebesar 72% dari total timbulan sampah tahun 2023. Pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan sistem 3R akan mendorong masyarakat untuk turut serta mengelola sampah rumah tangga sehingga bank sampah dinilai menjadi solusi paling efektif dalam mengatasi permasalahan

penumpukan sampah di TPA Jatibarang. Hal ini didukung Nurhajati (2022: 17) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa dengan adanya program bank sampah di Kabupaten Tulungagung telah membuat masyarakat terbiasa mengelola sampah sesuai dengan prinsip 3R.

Pengelolaan sampah melalui bank sampah diharapkan mampu membuat masyarakat memilih dan memilah sampah dari rumah sehingga sampah yang diangkut ke TPA dapat berkurang sesuai target Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, yaitu mengurangi sampah di TPA Jatibarang sebesar 30% (DLH Kota Semarang, 2024). Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah, yang diperinci pada Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan tentang bank sampah sebagai tempat pengumpulan dan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali sehingga memiliki nilai ekonomi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menargetkan setiap kelurahan minimal memiliki satu bank sampah yang dikelola oleh masyarakat setempat (DLH Kota Semarang, 2024). Berdasar data Dinas Lingkungan Hidup hingga tahun 2023 tercatat Kota Semarang memiliki 497 bank sampah aktif yang resmi terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tersebar di beberapa wilayah, salah satunya di Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik (Antarajateng, 2023). Pavitasari & Septiarani (2023: 109) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Kelurahan Pudukpayung memiliki delapan unit bank sampah yang tersebar di beberapa wilayah RW dan salah satunya adalah Bank Sampah Payung Lestari.

Kelurahan Pudakpayung merupakan salah satu kampung tematik yang memiliki ciri khas jajanan tradisional. Terdapat beberapa usaha kecil rumah tangga yang aktif memproduksi makanan tradisional, seperti kue basah, kue kering, dan sebagainya. Usaha kecil rumah tangga tersebut tentunya menghasilkan sampah yang turut menambah jumlah sampah di Kelurahan Pudakpayung. Oleh karena itu, keberadaan Bank Sampah Payung Lestari menjadi sangat penting agar pengelolaan sampah di Kelurahan Pudakpayung dapat terus berjalan dengan baik.

Penelitian ini terfokus pada program pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari yang berlokasi di Jl. Situk RW 04 Pudakpayung. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, tahun 2023 Bank Sampah Payung Lestari menjadi bank sampah terbaik di Kota Semarang.

Tabel 1.3 Pemenang Evaluasi Pengelolaan Bank Sampah Tingkat Kota Semarang Tahun 2023

No	Pemenang	Nama Bank Sampah	Kecamatan
1	Juara I	Bank Sampah Payung Lestari	Banyumanik
2	Juara II	Bank Sampah Sari Asri 3	Tembalang
3	Juara III	Bank Sampah Sumber Urip	Semarang Utara
4	Juara Harapan I	Bank Sampah Harmoni Resik Becik	Mijen
5	Juara Harapan II	Bank Sampah Berkah	Semarang Utara
6	Juara Harapan III	Bank Sampah Asri Sari	Pedurungan

Sumber: DLH Kota Semarang, 2023

Penghargaan tersebut diraih oleh Bank Sampah Payung Lestari karena dinilai memiliki manajemen pengelolaan sampah terbaik di Kota Semarang. Bank Sampah Payung Lestari juga dinilai aktif dan memiliki kreativitas melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kreasi sampah.

Pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan cara pemberian pembinaan berupa edukasi yang tepat dan sesuai dengan perundang-

undangan menjadi salah satu cara yang efektif agar tidak terjadi penimbunan sampah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ariany (2019) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan program pendampingan dan sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan memiliki efektivitas yang cukup baik untuk dilakukan secara nyata. Pentingnya partisipasi penuh dari masyarakat memerlukan adanya antusiasme yang besar. Karo (2009) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi aspek penting dalam optimalisasi program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank sampah dapat menjadi salah satu sarana pemberdayaan masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Apabila bank sampah dijadikan sebagai sistem pengelolaan sampah yang dilakukan secara kolektif, maka dapat terwujud adanya kontribusi aktif dari masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dengan mendapatkan keuntungan ekonomi (Yayasan Unilever Indonesia, 2013).

Bank Sampah Payung Lestari dinilai memiliki manajemen pengelolaan sampah terbaik di Kota Semarang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, namun Bank Sampah Payung Lestari masih mengalami adanya permasalahan terkait masyarakat yang aktif memilah dan menabung sampah. Berdasarkan data Bank Sampah Payung Lestari tahun 2023 jumlah masyarakat yang aktif untuk ikut memilah dan menukarkan sampah menjadi tabungan nominal uang sebesar 250 kepala keluarga. Jumlah tersebut baru 69% dari jumlah kepala keluarga yang ada di RW 04 Kelurahan Pudakpayung. Berdasar hasil pra penelitian diketahui bahwa penyebab masyarakat yang tidak ikut memilah sampah karena kesibukan atas pekerjaan mereka dan lebih memilih membayar tukang kebersihan untuk

mengangkut sampah mereka. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab penumpukan sampah di TPA Jatibarang. Penanganan sampah akan semakin lama jika tidak dikelola langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya untuk meninjau kembali bagaimana program rutin yang dilakukan Bank Sampah Payung Lestari untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari program Bank Sampah Payung Lestari guna menyadarkan masyarakat sehingga program pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari dapat terlaksana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Payung Lestari serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Payung Lestari.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memperbanyak wawasan dalam pengembangan pengetahuan Ilmu Administrasi Publik dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat mengelola sampah melalui bank sampah.

2. Bagi Bank Sampah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi gambaran umum tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di bank sampah dan faktor-faktor yang memengaruhinya sehingga pengurus bank sampah dapat mengkaji ulang peraturan dan kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi motivasi kepada warga masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam pengelolaan sampah di bank sampah.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.4 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Penulis	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Resik Apik Kelurahan Sronдол Kulon (Briliani, R. E., Widowati, N., & Maesaroh, 2023)	Menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Resik Apik serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat	Akses dan partisipasi telah terpenuhi dan mendukung pelaksanaan pemberdayaan, namun aspek kontrol dan kesejahteraan belum mendukung pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat pemberdayaan tersebut adalah keterbatasan kemampuan manajerial dan minimnya kemampuan pengelolaan pasar, sedangkan faktor pendorong pemberdayaan tersebut adalah sumber daya alam.
2	<i>Determinants of Sustainability in Recycling of Municipal Solid Waste: Application of Community-Based Social Marketing (CBSM)</i> (Heydari, E., Solhi, M., Janani, L., & Farzadkia, M., 2021)	Menganalisis status perilaku pemisahan limbah padat kota dan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi perilaku tersebut	Tingkat partisipasi masyarakat kota di Iran dalam pemilahan sampah dari sumbernya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu usia, tingkat pendidikan, manfaat, hambatan struktural, motivasi, kesadaran, dan norma sosial.
3	<i>A Study of Policy Implementation and Community Participation in the Municipal Solid Waste Management in the Philippines</i>	Mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat	Kebijakan pengelolaan sampah terpadu berdasarkan prinsip 3R di tingkat desa masih menjadi tantangan karena kebiasaan masyarakat yang masih mengumpulkan dan mengangkut sampah, dana

	(Camarillo, M. E. C., & Bellotindos, L. M., 2021)		yang tidak memadai, dan tempat pembuangan akhir sampah yang tidak mencukupi.
4	<i>Participation in Community-Based Solid Waste Management in Nkulumane Suburb, Bulawayo, Zimbabwe</i> (Sinthumule, N. I., & Mkumbuzi, S. H., 2019)	Menganalisis partisipasi masyarakat mengelola sampah di pinggiran Kota Nkulumane	Pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat di pinggiran Kota Nkulumane belum berhasil mengubah perilaku warga membuang sampah sembarangan karena organisasi berbasis masyarakat tidak melakukan upaya untuk menerapkan praktik pengelolaan sampah alternatif daur ulang dan pengomposan sampah serta kurangnya dana untuk memperbaiki infrastruktur persampahan.
5	Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisata Alam Kaliwungu Melalui Program Perhutanan Sosial Oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Aidah, N. A., Maesaroh, & Widowati, N., 2023)	Menganalisis keberhasilan kelompok tani hutan yang diberdayakan melalui Program Perhutanan Sosial dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan tersebut	Indikator akses sudah baik, namun partisipasi, kontrol, dan kesejahteraan masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan sumber daya, pengelolaan, pemasaran, dan dukungan dari pihak lain.
6	Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang (Jayanti, I. D., Warsono, H., &	Menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat program pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat di Desa Punjulharjo didukung oleh faktor sumber daya alam, keadaan kelembagaan, keadaan sarana dan prasarana, kebijakan pembangunan, organisasi dan administrasi, serta potensi ekonomi dan keunggulan lokal. Namun,

	Nurcahyanto, H., 2022)		hal itu terhambat oleh keadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
7	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan (Mubarokah, F., Maesaroh, & Widowati, N., 2022)	Menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo	Pemberdayaan masyarakat belum berhasil dilaksanakan karena masih terdapat beberapa aspek yang belum tercapai di antaranya akses fisik, kontrol dan kesejahteraan. Faktor pendorong pemberdayaan ini antara lain sarana dan prasarana, sumber daya alam, serta kebijakan. Sementara itu, faktor penghambat pemberdayaan ini adalah tidak ada kemampuan mengelola peluang pasar, keterbatasan kemampuan manajerial, dan keterbatasan modal usaha yang dimiliki.
8	<i>Effectiveness of Community Participation as Anti-litter Monitors in Solid Waste Management in Metropolitan Areas in a Developing Country</i> (Zambezi, F. M., Muisa-Zikali, N., & Utete, B., 2021)	Menilai efektivitas pelibatan masyarakat dalam pelatihan pemantau anti sampah di Mbare dan Sunningdale, Harare, Zimbabwe	Persentase responden yang setuju bahwa mengelola sampah merupakan tanggung jawab bersama di Mbare lebih besar dibandingkan dengan di Sunningdale. 100% penduduk yang diwawancarai di Mbare menunjukkan sikap baik hingga lebih baik terhadap anti-sampah, sementara 17% penduduk di Sunningdale mengungkapkan sikap negatif terhadap inisiatif anti-sampah.
TAHAPAN PEMBERDAYAAN			
9	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah 'Gedawang	Menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Gedawang	Pemberdayaan belum berjalan dengan baik karena pada tahap penyadaran, tahap koordinasi, dan tahap

	Asri' Kelurahan Gedawang Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Bella, T. K., Widowati, N., & Maesaroh, 2022)	Asri dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya	pemberdayaan masyarakat masih menghadapi kendala. Faktor pendorong pemberdayaan ini adalah sarana prasarana dan kerjasama dengan pihak lain. Sementara itu, faktor penghambat pemberdayaan ini adalah pola pikir masyarakat yang salah, kurangnya kedisiplinan nasabah, dan adanya pandemi covid-19.
10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah 'Arunika' di Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung (Ramadhan, C. I., Santoso, S., & Hanani, R., 2022)	Menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah Arunika	Tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan masyarakat dinilai berjalan baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pemberian hak otonomi kepada masyarakat, kepercayaan dari pemerintah, ketersediaan dukungan dan sumber daya, kemauan masyarakat, dependensi masyarakat, dan perubahan lingkungan.
11	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Karangrejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang (Larasati, A. D., Nurcahyanto, H., & Marom, A., 2024)	Menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat dan faktor pendorong serta faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui Balkondes Karangrejo	Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat di Balkondes Karangrejo belum berjalan optimal karena masih ditemukan kendala-kendala pada setiap tahapan pemberdayaan. Faktor pendorong pemberdayaan ini, yaitu motivasi dan kebijakan pemerintah, sedangkan faktor penghambatnya, yaitu sumber daya dan keterbatasan infrastruktur serta akses.
12	Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Cikakak	Menganalisis tahapan pemberdayaan masyarakat dalam	Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Cikakak

	Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas (Handayani, A. V., Maesaroh, & Widowati, N., 2023)	pengelolaan Desa Wisata Cikakak dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	belum berjalan sesuai harapan karena masih terdapat kendala yang ditemui pada setiap tahapan. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat ini, antara lain organisasi, sumber daya manusia, dan modal usaha.
13	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik <i>Home Industry</i> di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang (El Ha, R. F., Nurcahyanto, H., & Marom, A., 2022)	Menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik industri rumahan dan faktor penghambatnya	Pemberdayaan masyarakat melalui kampung tematik industri rumahan telah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memetakan potensi yang dimiliki dan permasalahan wilayah meskipun belum sampai taraf kemandirian dan keberdayaan. Terdapat beberapa permasalahan pada tahapan pemberdayaan, yaitu disposisi, struktur birokrasi, sumber daya, dan komunikasi.
14	Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung <i>Home Industry</i> di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang (Rahmawati, N. N., Widowati, N., & Maesaroh, 2024)	Menganalisis upaya pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pada program kampung <i>home industry</i>	Tahap sosialisasi, tahap proses pemberdayaan, dan tahap pemandirian belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan manajerial, kurangnya kemampuan mengelola peluang pasar, dan kurangnya partisipasi masyarakat.
15	Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Sentra Kopi di Desa Wisata Doesoen Sirap Kabupaten Semarang	Menganalisis proses manajemen yang tepat untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui	Supaya mampu mengelola program pemberdayaan masyarakat yang menghasilkan <i>output</i> terbaik, Dusun Sirap dapat melakukan empat tahapan pemberdayaan masyarakat,

	(Rahayu, A. P., Rostyaningsih, D., & Lestari, H., 2022)	sentra kopi di Dusun Sirap	yaitu tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program, dan tahap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.
--	---	-------------------------------	--

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Penelitian-penelitian terdahulu merupakan kerangka acuan yang digunakan sebagai bahan bacaan juga rujukan subjek penelitian, bahan perbandingan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, serta membantu penyusunan penelitian ini agar sistematis. Dari penelitian-penelitian terdahulu diketahui bahwa telah ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan program bank sampah untuk pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berikut deskripsi singkat penelitian-penelitian terdahulu di atas:

Pertama, kajian tentang pemberdayaan masyarakat menggunakan teori pengaruh pemberdayaan masyarakat menurut Arsiyah (2009) meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, kemampuan manajerial, kemampuan mengelola peluang pasar, koordinasi pemerintah dengan masyarakat, dan bantuan modal dari swasta. Teori tersebut digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Briliani dkk (2023), Aidah dkk (2023), Mubarakah dkk (2022), dan Rahmawati dkk (2024). Kemudian, teori pengaruh pemberdayaan masyarakat dari Mardikanto (2013) meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, kebijakan, kelembagaan, organisasi dan administrasi, serta sarana dan prasarana. Teori tersebut digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Briliani dkk (2023), Jayanti dkk (2022), Mubarakah dkk (2022), dan Handayani dkk (2023).

Kajian tentang pemberdayaan masyarakat menggunakan teori pengaruh pemberdayaan masyarakat menurut Anggraini (2015) meliputi keterlibatan anggota, keterlibatan masyarakat sekitar, kerjasama dengan pihak lain, sarana dan prasarana, salahnya *mindset* masyarakat sekitar, dan ketidak disiplin nasabah yang digunakan oleh Bella dkk (2022) dalam penelitiannya. Kemudian, teori pengaruh pemberdayaan masyarakat dari Sumaryadi (2005) meliputi pemberian hak otonomi kepada masyarakat, kepercayaan, ketersediaan dukungan dan sumber daya, perubahan lingkungan, kemauan masyarakat, dan dependensi masyarakat yang digunakan oleh Ramadhan dkk (2022) dalam penelitiannya. Kemudian, teori pengaruh pemberdayaan masyarakat dari Margayaningsih (2018) meliputi motivasi, kebijakan pemerintah, sumber daya, sarana dan prasarana yang digunakan oleh Larasati dkk (2024) dalam penelitiannya.

Kedua, kajian tentang pemberdayaan masyarakat menggunakan teori tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) meliputi tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan, dan tahapan pendayaan. Teori tersebut digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Bella dkk (2022), Ramadhan dkk (2022), Larasati dkk (2024), Handayani dkk (2023), dan El Ha dkk (2022). Kemudian, teori tahapan pemberdayaan dari Tim Delivery (dalam Mardikanto & Soebianto, 2017) meliputi tahapan seleksi wilayah, tahapan sosialisasi pemberdayaan masyarakat, tahapan proses pemberdayaan masyarakat, dan tahapan pemandirian masyarakat yang digunakan oleh Rahmawati dkk (2024) dalam penelitiannya. Kemudian, teori tahapan pemberdayaan dari Soekanto (1987) meliputi tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program,

dan tahap implementasi program pemberdayaan yang digunakan oleh Rahayu dkk (2022) dalam penelitiannya.

Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokusnya pada pemberdayaan masyarakat. Fokus dalam penelitian ini mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat menggunakan teori tiga tahapan pemberdayaan Wrihatnolo & Dwidjowijoto untuk menilai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini hanya menggunakan teori pengaruh pemberdayaan masyarakat dari Mardikanto & Soebiato.

1.5.2 Administrasi Publik

Chakrabarty & Chand (2012: 2-3) dalam bukunya yang berjudul “*Public Administration in a Globalizing World*” merangkum beberapa definisi administrasi publik menurut beberapa ahli, berikut ini:

1. Menurut Dimock dan Dimock (1969: 3-11) administrasi publik dalam pemecahan masalah harus memperhatikan kebijakan publik dan mencapai tujuan masyarakat serta bersifat eksploratif dan inovatif berdasarkan pada pemahaman untuk menyelesaikan masalah kelompok agar lebih efektif.
2. Menurut Wilson (1953: 65-75) administrasi publik sebagai pelaksanaan aturan publik secara rinci dan sistematis. Setiap penerapan aturan publik merupakan tindakan administrasi.
3. Menurut L. D. White (1955: 2) administrasi publik adalah gabungan dari semua undang-undang, peraturan, praktik hukum, dan adat istiadat yang berlaku dalam yurisdiksi mana pun sebagai pelaksanaan kebijakan publik.

4. Menurut Corson dan Harris (1967: i) administrasi publik adalah pengambilan keputusan, perencanaan kegiatan yang harus dilakukan, perumusan tujuan dan sasaran, serta tindakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan.
5. Menurut Pfiffner dan Presthus (1953: 3) administrasi publik adalah kerjasama individu dan kelompok untuk mengimplementasikan kebijakan publik.
6. Menurut Felix A. Nigro (1970: 21) administrasi publik adalah kolaborasi di lingkungan publik dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Administrasi publik berperan penting menciptakan kebijakan publik untuk pelayanan masyarakat.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli di atas, administrasi publik adalah kerja sama sekelompok orang atau lembaga pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hubungan administrasi publik dengan penelitian ini, yaitu pengelolaan sampah di bank sampah merupakan bagian dari administrasi publik, di mana pengelolaan sampah termasuk dalam manajemen lingkungan yang menjelaskan bagaimana manajemen dan organisasi atau lembaga mampu mengolah atau memanfaatkan sampah untuk dijadikan sesuatu yang lebih berguna. Selain itu, bank sampah adalah bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah untuk mengurangi dampak dari timbunan sampah yang terus meningkat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma juga dapat diartikan sebagai suatu pola atau model yang menggambarkan lokus dan fokus administrasi publik. Paradigma adalah sudut pandang seorang ahli yang terbentuk selama evolusi suatu ilmu atau merupakan

konsensus beberapa ahli yang bertujuan untuk menghasilkan informasi baru. Setelah itu, paradigma ahli memunculkan sejumlah penelitian yang muncul di masyarakat dan menjadi bukti mendasar keberadaan peradaban. Berikut ini adalah perkembangan paradigma administrasi publik menurut Ikeanyibe dkk (2017: 3-7) dalam jurnalnya yang berjudul *“Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria”*:

1. Paradigma I: Dikotomi Administrasi Politik (1900-1926)

Paradigma I dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi untuk menjalankan program secara efektif dan efisien. Paradigma dikotomi politik menyatakan bahwa administrasi terdiri dari politik dan administrasi. Menurut paradigma ini, administrasi dan politik merupakan dua hal yang saling bergantung yang tidak terpisahkan.

2. Paradigma II: Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Paradigma II berfokus pada administrasi publik yang memaparkan fungsi serta prinsip manajemen, sedangkan lokusnya tidak terperinci yang membuat paradigma ini universal dengan lebih menekankan fokus dibandingkan lokusnya.

3. Paradigma III: Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Paradigma ini kembali mengintegrasikan ilmu politik dengan administrasi publik sehingga memungkinkan lingkungan politik memengaruhi penerapannya dan mencegahnya menjadi bebas nilai. Menurut paradigma ini, administrasi negara muncul sebagai ilmu politik antara tahun 1950 dan 1970 dalam upaya mengembalikan hubungan konseptual antara ilmu politik dan administrasi

negara. Namun, pada tahun 1962 muncul keyakinan baru tentang administrasi publik sebagai ilmu politik yang berpusat pada birokrasi dan administrasi negara tidak lagi dipandang sebagai ilmu politik.

4. Paradigma IV: Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956-1970)

Menurut Henry (1975) paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik tidak meninggalkan lokus dan fokus ilmu pengetahuan sebelumnya, yaitu sebagai ilmu manajemen. Administrasi publik sebagai manajemen harus bertahan meskipun akan tergantikan oleh paradigma selanjutnya.

5. Paradigma V: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Secara ilmiah dan menyeluruh, administrasi publik merupakan ilmu administrasi dan prinsip-prinsip manajemen dikembangkan kembali, mencakup perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penggunaan teknologi kontemporer. Administrasi negara dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ilmu administrasi yang menjelaskan kebijakan publik dan pengembangan ilmu administrasi murni berdasarkan psikologi sosial. Paradigma V menyatakan bahwa administrasi publik kembali pada fokus semula, yaitu menggunakan ilmu manajemen dan teori organisasi dalam administrasi publik. Penekanan administrasi publik dan administrasi bisnis identik dalam paradigma ini. Penekanannya masing-masing adalah pada efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

6. Paradigma VI: Tata Kelola (1990-sekarang)

Paradigma ini diketahui sejumlah kelompok masyarakat yang memiliki kewenangan secara langsung berdampak pada hubungan kelembagaan serta kemajuan perekonomian dan masyarakat, melalui pengesahan undang-undang

dan penyebarannya. Konsep ini dikenal dan diaplikasikan tahun 1980 hingga 1990 untuk memenuhi syarat aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Secara lebih luas, konsep *governance* merupakan tata kelola yang dilakukan oleh antar bagian pemerintah untuk menjalankan sebuah proses pemerintahan demi memajukan sebuah visi misi yang telah ditetapkan di dalam tujuan pembangunan.

Menurut penjelasan paradigma administrasi publik di atas, penelitian ini menggunakan paradigma keenam, yaitu tata kelola (*governance*). Hal ini karena pemberdayaan masyarakat melibatkan peran serta pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan tanggung jawab sosial agar pemberdayaan masyarakat dapat dikelola secara berkelanjutan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah salah satu bidang ilmu administrasi publik, selain Kebijakan Publik, yang mengkaji proses menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjalankan prinsip manajemen terhadap pelayanan kepada publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Overman (dalam Pasolong, 2007: 83) yang menyatakan bahwa manajemen publik merupakan studi interdisipliner mengenai aspek organisasi umum yang menggabungkan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian) dengan sumber daya manusia, politik, keuangan, fisik, dan informasi.

Salah satu sumber daya yang harus dimiliki untuk mengelola suatu organisasi, khususnya pada penelitian ini adalah sumber daya manusia (masyarakat) sebagai

penggerak atau pelaku utama yang akan menentukan arah keberjalanan kegiatan pengelolaan sampah di bank sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan faktor pendukung pemberdayaan serta meminimalisir faktor yang menghambat pemberdayaan.

Paradigma manajemen publik telah mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Bermula dari paradigma *Old Public Administration* (OPA) hingga berkembang menjadi paradigma *New Public Services* (NPS). Dalam perkembangan tersebut banyak terjadi perubahan salah satunya penyebutan *government* menjadi *governance* serta terdapat istilah baru, yakni *good governance*. Menurut Tilano & Suwitri (2019: 6) *good governance* merupakan proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat. Pada penelitian ini juga diketahui bahwa posisi pengelolaan sampah di bank sampah termasuk dalam paradigma *New Public Service* (NPS) yang lebih berfokus pada *citizen right based* untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep *good governance*.

1.5.5 Pemberdayaan Masyarakat

Mengutip pendapat Sumaryadi (2005: 11), pemberdayaan masyarakat adalah upaya penyiapan masyarakat disertai penguatan kelembagaan masyarakat sehingga mampu mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, serta kemajuan dalam suasana keadilan berkelanjutan. Menurut Mardikanto & Soebiato (2017: 100), pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial, perubahan ekonomi, dan perubahan politik untuk memberdayakan dan

memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama yang partisipatif sehingga terjadi perubahan perilaku pada semua *stakeholders* (individu, kelompok, dan lembaga) yang terlibat dalam proses pembangunan guna mewujudkan kehidupan yang semakin berdaya, kehidupan yang mandiri, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Sumartiningsih (2004: 50) mengatakan pemberdayaan bertujuan untuk memampukan masyarakat agar mampu mewujudkan kekuatan dan kemampuan sehingga mampu mengenali kebutuhannya sendiri dan mengatasi tantangan masa depan. Terdapat tahapan pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengkaji efektivitas pemberdayaan yang sedang berlangsung. Tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007: 2-7) ada tiga tahapan, yaitu:

1) Tahap Penyadaran

Pada tahap ini, kesadaran diberikan kepada target pemberdayaan dengan memberitahu mereka bahwa mereka berhak atas sesuatu. Prinsip dasarnya adalah membuat target menyadari bahwa mereka perlu diberdayakan dan bahwa prosesnya dimulai dari diri sendiri.

2) Tahap Pengkapasitasan

Tahap ini sering disebut sebagai pengembangan kapasitas atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan. Sebelum diberikan daya atau kekuasaan, individu yang dimaksud harus mampu terlebih dahulu. Proses pengembangan kapasitas ada tiga jenis, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas manusia dalam arti memberdayakan individu dan kelompok melalui sosialisasi, lokakarya, seminar, dan pelatihan. Pengkapasitasan dalam arti pengembangan kapasitas individu dan kelompok manusia untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.
- b. Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan dalam bentuk penataan kembali organisasi yang akan menerima daya atau kapasitas.
- c. Peningkatan kapasitas sistem nilai dilakukan dengan membantu target dan menetapkan aturan dasar di antara mereka sendiri. Dalam lingkup organisasi, sistem nilai terhubung dengan Peraturan Koperasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Sistem dan Prosedur, dan dokumen serupa. Pada tingkat yang lebih tinggi, sistem nilai juga mencakup etika, pemerintahan yang baik, dan budaya organisasi.

3) Tahap Pendayaan

Pada tahap ini, target diberi daya, kekuasaan, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas keterampilan yang telah dimiliki. Gagasan utama dari pemberdayaan adalah bahwa daya atau kekuasaan diberikan berdasarkan keterampilan penerimanya.

Faktor pemberdayaan masyarakat merupakan beberapa elemen yang mampu menjadi penentu dari tinggi atau rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan serta turut menentukan baik atau buruknya kualitas dari pemberdayaan masyarakat yang diterapkan. Mardikanto & Soebiato (2017: 188-195) menjelaskan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Keadaan sumber daya alam. Dengan mengenali kondisi sumber daya alam yang baik, seorang fasilitator penyuluhan akan dapat mengamati kelebihan dan keterbatasan alam yang dimiliki dan yang harus diatasi oleh masyarakat penerima manfaat di wilayah kerjanya.
- 2) Keadaan sumber daya manusia. Setiap penyuluh harus benar-benar mengetahui karakteristik masing-masing warga masyarakat yang akan menjadi penerima manfaat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok sosial. Beberapa karakteristik sumber daya manusia yang harus diperhatikan oleh setiap fasilitator penyuluhan, yaitu kepadatan penduduk, keberagaman penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, laju pertumbuhan, tingkat pendidikan, nilai sosial budaya, mata pencaharian, kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan dan penyelesaian konflik.
- 3) Keadaan kelembagaan. Keadaan kelembagaan perlu diperhatikan oleh fasilitator penyuluhan yang meliputi lembaga ekonomi dan lembaga sosial. Lembaga berperan sebagai pelaksana dalam program pemberdayaan sesuai tujuan yang ditetapkan.
- 4) Keadaan sarana dan prasarana. Untuk membantu pelaksanaan program pemberdayaan, semua fasilitator penyuluhan harus mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana.
- 5) Kebijakan. Adanya kebijakan pemerintah merupakan salah satu prasyarat dan faktor pendukung terlaksananya program pemberdayaan. Setiap fasilitator penyuluhan harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang semua aturan dan hasil diskusi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan program

pemberdayaan. Fasilitator penyuluhan akan kesulitan membuat program pemberdayaan masyarakat jika mereka tidak memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebijakan yang disepakati. Program pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan dapat kurang bermanfaat, berbeda, atau bertentangan dengan kebijakan dan kesepakatan yang ada.

- 6) Potensi kelompok dan keunggulan lokal. Untuk membangun daya saing atau sinergi dengan pemerintah daerah lain, pemerintah nasional, atau menciptakan kemitraan internasional dengan dunia usaha dan lembaga pemerintah melalui 3P (*public, private, partnership*), setiap fasilitator pemberdayaan masyarakat harus mampu berkolaborasi dengan masyarakat untuk menganalisis potensi dan keunggulan lokal.
- 7) Organisasi dan tata kelola pemberdayaan masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan posisi dan statusnya, fasilitator penyuluhan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dan diatur, guna mewujudkan kerja sama yang harmonis dan serasi dengan aparat, masyarakat, dan antar sesama fasilitator dengan lembaga pendukung penyuluh. Hal yang perlu dipahami oleh setiap fasilitator penyuluhan, yaitu struktur organisasi, rincian kegiatan, hak dan kewajiban, serta jenjang karir.

Penelitian ini menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang serta

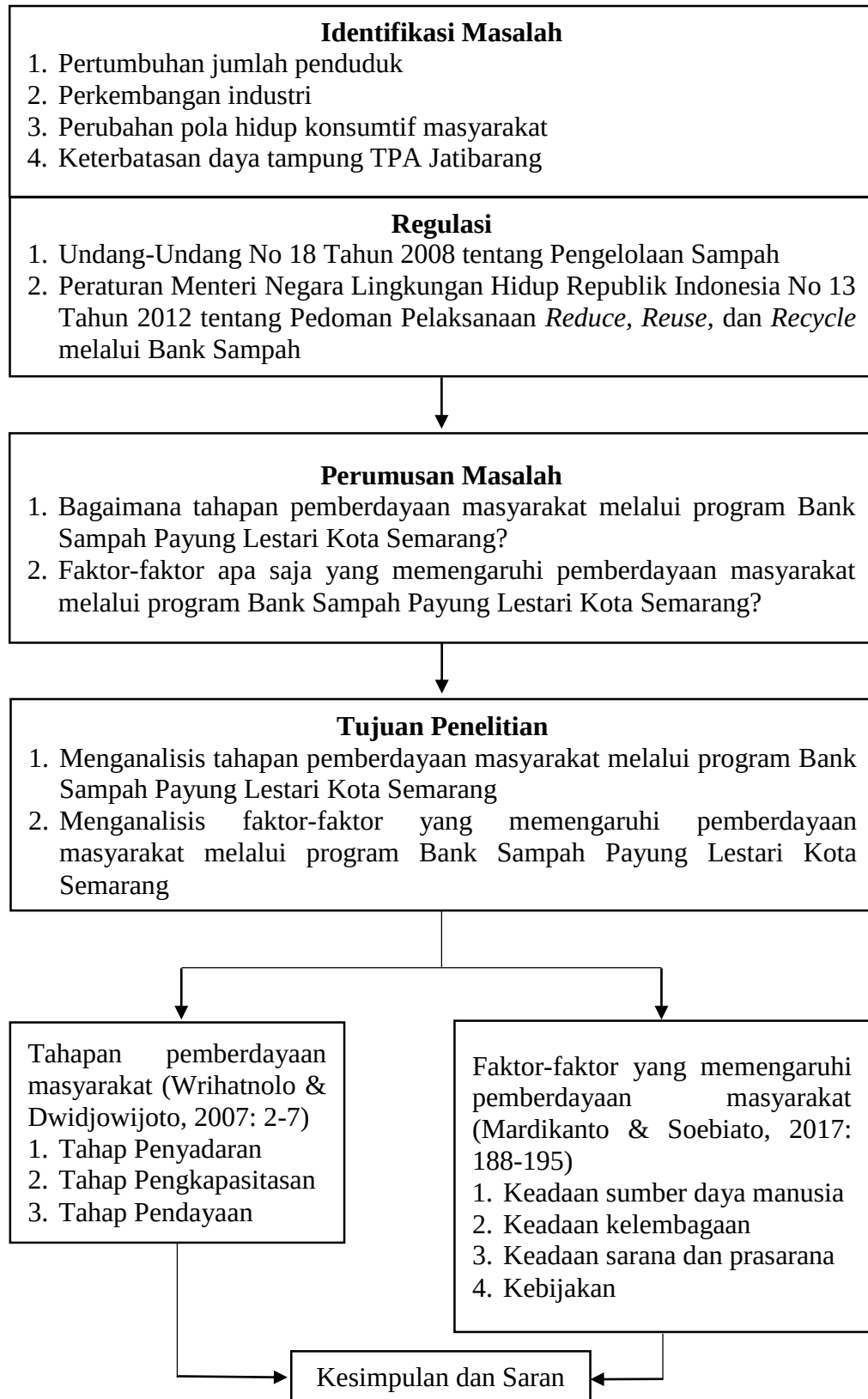
menggunakan teori dari Mardikanto & Soebiato untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat yang terjadi.

1.5.6 Bank Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 Pasal 1 menyebutkan bahwa bank sampah adalah sarana yang disediakan bagi masyarakat untuk dapat memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali menjadi sampah yang memiliki nilai jual. Yayasan Unilever Indonesia (2013: 3) menjelaskan bahwa bank sampah merupakan metode pengelolaan sampah kering secara kolaboratif yang mengajak masyarakat berperan aktif dalam pemilahan dan pengelolaan sampah.

Asteria & Heruman (2016) mengatakan bahwa bank sampah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dengan berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai sampah yang memiliki nilai ekonomi untuk ditukarkan menjadi sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi. Secara umum, fungsi bank sampah adalah menampung sampah masyarakat yang ditabung untuk dijual kepada pengepul atau pabrik pengolah sampah. Pendirian bank sampah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Masyarakat sebagai pihak yang memproduksi sampah harus terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah.

1.6 Kerangka Pikir Penelitian



1.7 Operasionalisasi Konsep

Pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari di Kelurahan Pudakpayung merupakan suatu upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan potensi, mengembangkan kemampuan, dan menambah pengetahuan terkait pengelolaan sampah yang bersifat berkelanjutan yang berguna untuk membantu pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat di Kelurahan Pudakpayung melalui program Bank Sampah Payung Lestari. Di dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari yang dilakukan pengurus bank sampah, peneliti menggunakan teori tahapan pemberdayaan dari Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007: 2-7) dan teori faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat dari Mardikanto & Soebiato (2017: 188-195).

1.7.1 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang

Fenomena Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang dengan menggunakan teori tahapan pemberdayaan dari Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007: 2-7) sebagai berikut:

1. Tahap Penyadaran

Penyadaran merupakan tahapan paling awal pemberdayaan masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat Kelurahan Pudakpayung untuk lebih peduli lingkungan dengan ikut mengelola sampah rumah tangga. Dalam menganalisis tahap penyadaran, fenomena yang diamati adalah:

1) Sosialisasi oleh pengurus Bank Sampah Payung Lestari

Sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus Bank Sampah Payung Lestari kepada masyarakat terkait permasalahan sampah di Kelurahan Pudukpayung, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sampah melalui Bank Sampah Payung Lestari.

2) Musyawarah pengurus Bank Sampah Payung Lestari bersama masyarakat

Musyawarah dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka terkait kegiatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Payung Lestari.

3) *Reward* dan *punishment* yang diberikan kepada masyarakat

Pemberian *reward* untuk meningkatkan kinerja dan semangat masyarakat dalam mengelola sampah, sedangkan *punishment* diberikan kepada masyarakat yang tidak disiplin untuk menyadarkan akan tanggung jawab telah bersama-sama komitmen bergabung dalam Bank Sampah Payung Lestari.

2. Tahap Pengkapasitasan

Pengkapasitasan adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat Kelurahan Pudukpayung dalam memanfaatkan sampah melalui pelatihan-pelatihan supaya masyarakat lebih terampil dan berani mengambil kesempatan atau peluang. Dalam menganalisis tahap pengkapasitasan, fenomena yang diamati adalah:

1) Pengembangan kapasitas pengurus Bank Sampah Payung Lestari

Pengembangan kapasitas pengurus bank sampah dilakukan sebelum mengembangkan kapasitas masyarakat karena pengurus bank sampah merupakan sebagai penggerak masyarakat.

2) Pengembangan kapasitas masyarakat

Pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengelola sampah organik dan sampah anorganik, baik pelatihan yang diberikan oleh pengurus Bank Sampah Payung Lestari maupun *trainer* yang ahli dibidangnya.

3. Tahap Pendayaan

Pendayaan adalah tindakan-tindakan yang memberikan peluang kepada masyarakat melalui Bank Sampah Payung Lestari untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Dalam menganalisis tahap pendayaan, fenomena yang diamati adalah:

1) Peluang yang diberikan kepada masyarakat, yaitu peluang usaha produk-produk hasil olahan sampah seperti produk kreasi dari sampah plastik, komposter, *eco enzym*, *ecobrick*, dan sebagainya.

2) Peran CSR (*Corporate Social Responsibility*), yaitu memberikan bantuan fasilitas yang dibutuhkan Bank Sampah Payung Lestari guna menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti bantuan sarana prasarana, bantuan dana, pemasaran produk hasil olahan sampah, dan sebagainya.

- 3) Perubahan karakter masyarakat, yaitu terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan akibat pengaruh dari adanya Bank Sampah Payung Lestari.

1.7.2 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang

Penelitian ini menggunakan teori dari Mardikanto & Soebiato (2017: 188-195) untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemberdayaan masyarakat, berikut ini:

1. Keadaan sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah pengurus Bank Sampah Payung Lestari, nasabah Bank Sampah Payung Lestari, dan masyarakat sekitar. Keadaan sumber daya manusia ditentukan dari partisipasi sumber daya manusia dalam mengikuti program pemberdayaan masyarakat dan keaktifan sumber daya manusia dalam mengelola sampah.

2. Keadaan kelembagaan

Lembaga yang dimaksud adalah pemerintah Kelurahan Pudukpayung dan Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang ikut berperan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

3. Keadaan sarana dan prasarana

Keadaan sarana dan prasarana ditentukan dari ketersediaan fasilitas dan akses yang memadai guna menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi:

gedung bank sampah, kendaraan pengangkut sampah, drum untuk membuat kompos, timbangan sampah, etalase untuk menjual hasil daur ulang.

4. Kebijakan

Kebijakan ditentukan dari kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam Bank Sampah Payung Lestari.

1.8 Argumen Penelitian

Angka produksi sampah di Kota Semarang masih tinggi yang dibuktikan dengan data jumlah sampah masuk di TPA Jatibarang. Kondisi ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan pola hidup konsumtif masyarakat sehingga memengaruhi daya tampung TPA Jatibarang dalam mengelola sampah. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu masyarakat. Permasalahan sampah yang belum tertangani secara optimal membuat Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan program pengelolaan sampah melalui bank sampah untuk mengurangi jumlah dan dampak jangka panjang akibat produksi sampah sehingga kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup dapat terjaga.

1.9 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang berlandaskan postpositivisme di mana hasil penelitian adalah data yang ditemukan di lapangan tanpa manipulasi (Sugiyono, 2016: 7). Instrumen penelitian kualitatif adalah *human instrument* atau peneliti maka seorang peneliti harus memiliki bekal

teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi fenomena yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan pada objek yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada data aktual di lapangan tanpa adanya manipulasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara empiris sehingga menghasilkan data deskriptif terdiri atas kata-kata, deskripsi, foto, dan catatan tentang keadaan sebenarnya di lapangan.

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah serta faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini memerlukan informasi yang bermakna dan mendalam dengan melihat dan memahami fakta di lapangan, kemudian membandingkan dengan teori yang mendukung untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan daerah atau lokasi yang ditetapkan sebagai tempat penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Bank Sampah Payung Lestari yang terletak di RW 04, Kelurahan Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang dianggap mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, pemilihan subjek penelitian ditentukan peneliti pada saat terjun ke lapangan atau selama penelitian berlangsung. Teknik yang digunakan untuk memilih subjek penelitian, yaitu *purposive sampling*. Sugiyono (2016: 218-219) mengatakan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel sumber data yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, termasuk mereka yang dianggap paling mengetahui tentang topik yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini berasal dari Kelurahan Pudakpayung, Bank Sampah Payung Lestari, dan masyarakat atau nasabah untuk menggali informasi secara mendalam tentang pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.

1.9.4 Jenis Data

Mengutip pendapat Sugiyono (2019: 9) bahwa jenis data dibagi menjadi data kualitatif, kuantitatif, dan gabungan. Data kualitatif berupa kata, narasi, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, foto, gambar, dan bagan. Penelitian ini menggunakan beberapa jenis data di antaranya:

1. Kata-kata yang disampaikan informan dan diperoleh langsung melalui wawancara di Bank Sampah Payung Lestari yang menjadi jenis data utama pada penelitian ini.
2. Data tertulis yang didapat dari dokumen, jurnal, dan peraturan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah Payung Lestari Kota Semarang sebagai bahan memperkaya informasi dalam penelitian ini.

3. Foto atau gambar dalam penelitian di Bank Sampah Payung Lestari diambil melalui tahapan observasi yang digunakan sebagai pendukung dan bukti bahwa penelitian telah dilaksanakan.

1.9.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara dan observasi langsung dengan informan.
2. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer. Data sekunder meliputi Surat Keputusan, laporan, peraturan, dan sebagainya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2016: 225) dapat dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi terkait permasalahan yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini bersifat langsung, formal, dan terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dengan informan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.

Proses wawancara menggunakan alat bantu, seperti buku, alat tulis, telepon genggam untuk merekam dan dokumentasi.

2. Observasi merupakan pengumpulan data melalui proses pengamatan di lapangan. Observasi dilakukan untuk memperoleh fakta tentang keadaan sebenarnya di lapangan. Observasi dalam penelitian ini dengan mengamati pemberdayaan masyarakat melalui program bank sampah.
3. Dokumentasi menurut Sugiyono (2016: 240) merupakan catatan kejadian masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan karya-karya besar. Pengumpulan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi Surat Keputusan, laporan, peraturan, dan dokumen lainnya.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Sugiyono (2016:244) adalah proses menemukan dan mengumpulkan informasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara metodis. Hal ini meliputi pengklasifikasian informasi, pembagiannya ke dalam unit-unit, sintesis, penyusunannya ke dalam pola, penentuan hal-hal yang penting dan akan diteliti, dan pengambilan kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses meringkas dan memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018: 135). Kondensasi data memberikan gambaran yang lebih jelas tentang temuan penelitian sehingga memudahkan

dalam menganalisis data. Kondensasi data dilakukan terkait pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018: 137), penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Selain itu, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, grafik, diagram dan sebagainya. Penyajian data yang dilakukan dengan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah secara naratif serta menggunakan tabel yang membantu menjelaskan penelitian.

3. Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2018: 142), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat di awal, namun hal ini belum tentu demikian karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih dalam tahap awal dan akan terus berkembang sebagai hasil penelitian lapangan.

1.9.8 Kualitas Data

Kualitas data, yaitu pengujian keabsahan data pada penelitian. Apabila hasil penelitian dan fakta lapangan sama, maka data tersebut dianggap asli. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi untuk menguji kualitas data. Menurut Sugiyono (2016: 273), triangulasi adalah proses verifikasi informasi dari beberapa sumber dengan cara dan waktu yang berbeda.

Ada dua metode yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kualitas data, yaitu:

1. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi dari berbagai sumber.
2. Triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai pendekatan untuk memverifikasi data dari sumber yang sama. Wawancara, observasi, dan dokumentasi menyeluruh semuanya dilakukan secara bersamaan untuk mengumpulkan data.